

MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN PENDIDIKAN ISLAM BERBASIS *ENTREPRENEURSHIP*

Suwantoro

Institut Agama Islam Negeri Madura, Indonesia

E-mail: wha.one31@yahoo.com

Abstract: The management process of good education and systematic by using management service as well as supported by the leadership implementation of headmaster as the man power in an education institution in good education grade level by sthrengthnen the aspec of institution finances through investment of soul, attitude and *entrepreneurship* charac-teristic which implemented in the leadership process of headmaster. To manage and lead education institution is complex thing, the complexity is not only related with quick change, but aslo caused by the development of the school organization internal expectations for the coordination of the education that have more quality and be able to give high satisfaction for entire education consumer, so that the implementation of *entrepreneurship* in the process to manage and lead the school institution as its basic hopefully could answer the problem and the able to create expectations in the internal adn external of school organization.

Keywords: Leadership, *Islamic Education*, *Entrepreneurship*

Pendahuluan

Pendidikan merupakan sebuah aktivitas yang senantiasa dilakukan oleh setiap manusia semasa hidupnya baik secara terencana ataupun tidak. Hal ini wajib dilakukan untuk mengetahui, mengenal dan sebagai sarana untuk mempertahankan hidup dengan mengasah pemikirannya serta memberdayakan dirinya dengan berbagai ilmu pengetahuan yang diperolehnya.

Sebagai sebuah wadah atau lembaga, pendidikan harus mampu menunjukkan kualitasnya dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang termaktub dalam tujuan pendidikan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan mulia tersebut tentu saja akan bisa berjalan dengan optimal apabila didukung dengan mutu pendidikan yang baik.

Dewasa ini, sudah banyak cara yang dilakukan oleh masyarakat khususnya para pengelola lembaga pendidikan dalam mengupayakan peningkatan mutu pendidikan. Berbagai cara tersebut tidak lain untuk meencetak sumber daya manusia (SDM) yang berkarakter, berkompeten dalam segala bidang dan memajukan masyarakat dan bangsa.

Dalam perjalanannya, upaya dalam peningkatan mutu pendidikan akan menemukan banyak faktor penghambat yang menjadi penghalang terhadap pencapaian tujuan pendidikan diantara dari sekian banyak faktor tersebut yang paling sering tampak adalah aspek *finacial*. Meskipun sudah ada anggaran khusus sebanyak 20% dari dana APBN untuk kepentingan pendidikan, terkadang belum bisa memenuhi berbagai macam kebutuhan dalam berlangsungnya proses pendidikan yang dikemas dalam sistem pembelajaran di dalam atau di luar lembaga pendidikan.

Ulasan tersebut, memberikan sebuah gambaran bahwa ketika lembaga pendidikan sudah mengalami krisis akan *financial* karena terbatasnya anggaran dan lain semacamnya, maka sudah dapat dipastikan upaya peningkatan mutu pendidikan yang menjadi prioritas utama dalam rangka menciptakan pendidikan yang unggul tidak akan terpenuhi bahkan tidak sama sekali. Begitu pula pada ranah tujuan pendidikan akan sulit untuk dicapai.

Tentunya, dengan melihat kondisi yang seperti itu, pemerintah selaku pemangku kebijakan harus cermat dan peka dalam mengulirkan beberapa kebijakan tentang pendidikan. Salah satu kebijakan yang sudah diberlakukan dalam sistem pendidikan adalah desentralisasi pendidikan. Dengan kebijakan ini, sekolah atau lembaga pendidikan diberi keleluasaan untuk mengelolahnya berdasarkan kondisi sekolah masing-masing dengan segala kompetensi yang di milikinya.

Adanya desentralisasi ini, memberikan dampak tersendiri kepada lembaga pendidikan dalam berbagai aspek, seperti dalam pengelolaan kurikulum, sarana dan prasarana, pembiayaan dan lain sebagainya. Konsep yang seperti ini sering kita sebut dengan MBS (Manajemen Berbasis Sekolah). Manajemen model ini memberikan paradigma baru tentang bagaimana pengelolaan pendidikan yang pada mulanya sentralistik berubah menjadi desentralistik.

Namun, meskipun demikian MBS ini hanya berorientasi pada pengelolaan lembaga pendidikan secara umum. Sehingga memunculkan kesan pendidikan dalam pengelolaannya sudah tampil secara

mandiri. Kemandirian tersebut semata-mata hanya dapat mewakili tugas dari pemerintah pusat untuk mengelolah lembaga pendidikannya.

Agar lembaga pendidikan tidak menggantungkan anggaran terhadap pemerintah, maka muncullah sebuah konsep baru dalam pengelolaan lembaga pendidikan sebagai dampak dari desentralistik yang kemudian dikenal dengan istilah manajemen pendidikan berbasis *entrepreneurship*, yakni dalam proses pengelolaan lembaga pendidikan yang dilakukan oleh pihak sekolah menggunakan jasa *entrepreneurship*.

Keberhasilan penerapan dari konsep MPBE ini tentunya tidak bisa berjalan tanpa adanya pengaruh dari faktor utama dalam lembaga pendidikan yaitu kepemimpinan lembaga pendidikan yang kita sebut dengan kepala sekolah. Dengan adanya desentralistik ini menekankan kepada setiap kepala sekolah dilingkungan lembaga pendidikan untuk merubah paradigma lama menjadi paradigma yang baru dalam menjalankan tugasnya untuk mempengaruhi orang-orang yang dipimpinnya serta dalam meningkatkan mutu pendidikan. Oleh sebab itu, selain membutuhkan model manajemen yang berbasis *entrepreneurship*, sekolah juga butuh terhadap eksistensi kepala sekolah yang berbasis *entrepreneurship*.

Konsep Dasar Manajemen Pendidikan Islam

Manajemen merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia baik dalam dunia bisnis, dunia organisasi, bahkan dalam dunia pendidikanpun masih membutuhkan terhadap jasa manajemen. karena manajemen memiliki peran penting untuk kemajuan suatu organisasi sekaligus mampu mengantarkan organisasi dalam mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Nanang Fatah mengungkapkan bahwa teori manajemen mempunyai peran dan membantu menjelaskan perilaku organisasi yang berkaitan dengan motivasi, produktivitas, dan kepuasan (*Satisfaction*)¹

Secara etimologis kata manajemen berasal dari kata “*Managio*” yang berarti “pengurusan” atau “*Managiare*” yang berarti melatih dalam mengatur langkah-langkah. Jadi, secara etimologis manajemen mempunyai arti mengelolah, memeriksa atau mengawasi dan

¹Mujamil Qomar, *Manajemen Pendidikan Islam* (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2007), hlm.3.

mengurus². Sedangkan secara terminologi manajemen dapat diartikan sebagai proses Perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan³.

Adapun Pendidikan *Islam*, penulis mengartikan sebagai wadah yang terorganisir secara sistematis yang di dalamnya terdapat aktivitas mendidik, membimbing, melatih dan lain sebagainya yang orientasinya adalah untuk memberikan pengembangan kepada manusia baik dari aspek pengetahuan, sikap ataupun keterampilan yang didasarkan pada nilai-nilai keIslaman.

Zarkowi soejoeti (1986) memberikan definisi terhadap pendidikan *Islam* dalam tiga pengertian yaitu: pertama pendidikan *Islam* adalah jenis pendidikan yang pendirian dan penyelenggaraannya didorong oleh hasrat dan semangat cita-cita untuk menanamkan nilai-nilai *Islam* baik yang tercermin dalam nama lembaganya maupun dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan. Pada pengertian ini kata "*Islam* " ditemptakna sebagai sumber nilai yang diwujudkan dalam seluruh kegiatan pendidikan. Kedua, jenis pendidikan yang memberikan perhatian sekaligus menjadikan ajaran *Islam* sebagai pengetahuan untuk program study yang diselenggarakan . disini kata "*Islam*" dijadikan sebagi mata pelajaran sebagaimana ilmu-ilmu yang lain. Ketiga, jenis pendidikan yang mencakup kedua aspek tersebut dimana kata "*Islam*" ditempatkan sebagai sumber nilai sekaligus sebagai bidang study yang ditawarkan lewat program study yang diselenggarakan.⁴

Dari penjelasan yang tertera di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan manajemen pendidikan *Islam* adalah serangkaian kegiatan mulai dari aktivitas merencanakan, mengorganisasikan, memotivasi, mengawasi dan mengembangkan segala upaya di dalam mengatur dan mendayagunakan sumber daya yang dimiliki oleh pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan *Islam* dengan didasarkan pada nilai-nilai keIslaman.

²Baharuddin, Moh. Makin, *Manajemen Pendidikan Islam* (UIN. Maliki Press, 2010), hlm.48.

³ Hani Handoko, "*Manajemen Edisi 2* "(Yogyakarta: BPFE, 2000), hlm. 8.

⁴ Marno & Triyo Supriyanto, *Manajemen Dan Kepemimpinan Pendidikan Islam*, (Bandung: Refika Aditama, 2013), hlm.4

Definisi lain juga menyebutkan bahwa manajemen pendidikan *Islam* merupakan sebuah proses pengelolaan lembaga pendidikan *Islam* secara *Islami* dengan cara menyiasati sumber-sumber belajar serta hal-hal lain yang terkait untuk mencapai tujuan pendidikan *Islam* secara efektif dan efisien⁵.

Dengan berdasarkan pada definisi di atas tentang makna manajemen pendidikan secara definitifnya, maka point penting yang perlu diingat adalah pada dasarnya setiap manajemen yang akan diterapkan dalam dunia pendidikan *Islam* harus benar-benar dilandasi dengan nilai-nilai ajaran *Islam*. Sehingga atas dasar inilah yang akan membedakan antara manajemen pendidikan yang bersifat konvensional dengan manajemen pendidikan *Islam* itu sendiri yang penekanannya tidak hanya hanya pada produktivitas dan kepuasan semata, melainkan ada yang jauh lebih penting dari pada itu yakni mengarah pada nilai-nilai eskatologis-transendental.

Fungsi – Fungsi Manajemen Pendidikan *Islam*

Dalam menjalankan Kegiatan-kegiatan (terutama dari pimpinan) untuk mencapai tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain, terwujud dalam fungsi-fungsi atau tugas tertentu dari para pimpinan. Pelaksanaan dari pada fungsi-fungsi itulah yang sebenarnya secara nyata dapat menggambarkan apa itu manajemen.⁶

Dalam konteks pendidikan *Islam*, fungsi manajemen akan menjadi suatu karakteristik tersendiri dari pendidikan *Islam* dalam memberikan arah pada perkembangan dan peningkatan lembaga pendidikan baik secara kualitatif ataupun kuantitatif dalam operasional lembaga pendidikan *Islam*. Dengan banyaknya fakta kerumitan serta berbagai persoalan yang lainnya dalam menjalankan program ataupun pengelolaan lembaga pendidikan *Islam*, maka perlu kiranya untuk merinci secara sistematis tentang prosedural dari pelaksanaan manajemen yang terakumulasi dalam fungsi-fungsi manajemen.

Secara umum, fungsi manajemen dalam manajemen pendidikan *Islam* memiliki keserupaan dengan manajemen konvensional yang tidak terlepas dari istilah POAC (*Planning, Organizing, Actuating* dan *Controlling*). Dengan mengimplementasikan fungsi-fungsi manajemen

⁵ Mujamil Qomar, *Manajemen Pendidikan Islam: strategi Baru Pengelolaan Pendidikan Islam*, (Jakarta: Erlangga :2007), hlm.11

⁶Alex gunur, *Manajemen: Kerangka-Kerangka Pokok*, (Jakarta : Bhartara Karya Aksara, 1982) , hlm. 32

tersebut, bisa dipastikan seluruh aktivitas dan program akan tersebar pada seluruh bagian organisasi pendidikan *Islam* yang tersusun dan tertata secara sistematis. Jika kita perinci lebih dalam lagi maka fungsi manajemen bisa terurai sebagai berikut:

1. *Planning* (Perencanaan)

Secara sederhana, perencanaan bisa kita artikan sebagai suatu aktivitas dalam pengambilan keputusan mengenai sasaran apa yang akan dicapai, tindakan apa yang akan diambil dalam rangka pencapaian tujuan dan siapa yang akan melaksanakan tugas-tugasnya. Menurut Burhanuddin perencanaan merupakan suatu kegiatan yang sistematis mengenai apa yang akan dicapai, kegiatan yang harus dilakukan, langkah-langkah, metode-metode, pelaksanaan yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pencapaian tujuan.⁷

Berpijak pada pengertian di atas, jika dikaitkan dalam konteks pendidikan, maka perencanaan secara definitif memiliki arti suatu bentuk aktivitas yang dilakukan berupa memikirkan dan memilih rangkaian tindakan-tindakan yang berorientasi pada pencapaian tujuan pendidikan. Dalam sebuah aktivitas merencanakan, pelaksana (perencana) harus menentukan beberapa aspek penting yang meliputi:⁸ a) Bentuk atau jenis kegiatan yang akan dilaksanakan; b) Pro-sedur pelaksanaan kegiatan; c) Kebijakan yang dijadikan landasan kegiatan; d) Arah dan tujuan yang hendak dicapai; e) Personal yang hendak melaksanakan rencana; e) Waktu pelaksanaan rencana; f) Anggaran yang dibutuhkan.

Aspek perencanaan dalam konteks manajemen pendidikan *Islam* tentunya tidak hanya menekankan pada hal-hal yang bersifat urgen dalam pencapaian tujuan pendidikan, lebih penting dari pada itu, penentuan dalam mencari langkah yang akan ditempuh memiliki nuansa kebaikan dan tidak bebas nilai yang akhirnya justru akan bertentangan dengan nilai-nilai *Islam* itu sendiri.

Oleh karena itu, perlu kiranya untuk dipahami bersama bahwa perencanaan dalam pendidikan *Islam* tidak hanya tertuju pada prioritas tindakan yang bertujuan pada jangka pendek, menengah ataupun panjang saja, tetapi perencanaan yang dilakukan juga harus bersifat eskatologis guna menuju kebahagiaan yang hakiki.

⁷ Baharuddin dan Moh.Makin, *Manajemen Pendidikan Islam.....*, hlm 99

⁸ Beni ahmad Saebani *Filsafat Manajemen*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), hlm. 175

2. *Organizing* (Pengorganisasian)

Pengorganisasian atau yang dikenal dengan istilah *organizing* merupakan tahapan yang kedua setelah melakukan proses perencanaan yang memiliki arti aktivitas mengatur, menstruktur dan menentukan tugas pekerjaan, macam pekerjaan, serta pembentukan badan unit kerja.⁹

Pengorganisasian juga dapat diartikan sebagai keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat tugas, tanggung jawab sedemikian rupa yang memungkinkan terciptanya suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai satu kesatuan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.¹⁰

Dalam konteks pendidikan *Islam*, pengorganisasian merupakan satu bentuk kegiatan dalam membentuk, mengatur seluruh sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas hingga memunculkan sebuah tanggung jawab yang didasarkan pada nilai-nilai ajaran *Islam*, sekaligus menjadikan aspek manusia sebagai bagian penting dalam manajemen pendidikan *Islam*.

3. *Actuating* (Penggerakan)

Tahapan yang ketiga dari proses manajemen sekaligus termasuk pada fungsi manajemen adalah *actuating* atau penggerakan. Dalam tahapan ini sangat erat sekali hubungannya dengan aktualisasi sumber daya manusia dalam sebuah organisasi sesuai dengan penempatan dan pembagian tugas yang sudah dilakukan dalam fungsi pengorganisasian.

Dalam tahap penggerakan, eksistensi dari seorang pemimpin dalam sebuah organisasi sangat menentukan. Pemimpin akan menjadi penggerak seluruh komponen yang lainnya agar mereka semua selalu bersedia dalam menjalankan tanggung jawab guna pencapaian tujuan organisasi. Sehingga prinsip menggerakkan dan memotivasi seluruh komponen organisasi merupakan bagian dari peran pemimpin yang tidak bisa diabaikan.

Dalam manajemen pendidikan *Islam*, penggerakan atau pengarahan bersifat komprehensif dan sangat kompleks. Dikatakan komprehensif karena berkaitan dengan tanggung jawab dan tugas-tugas kependidikan sebagai usaha dalam mencapai tujuan pendidikan.

⁹ Atiqullah & Nailah Aka Kusuma, *Manajemen Dan Kepemimpinan Pendidikan Islam*, (Surabaya: Pena Salsabila, 2014), hlm. 40

¹⁰ Sukaji & Umiarso, *Manajemen dalam Pendidikan Islam*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), hlm. 90

Dikatakan kompleks karena memang dalam mengerakkan ini tidak hanya tentang manusia saja melainkan juga tentang tingkah-laku mereka yang berbeda-beda yang akan memungkinkan berpengaruh pada proses pencapaian tujuan.

Kaitannya dengan hal tersebut, Umiarso menyebutkan bahwa ada beberapa prinsip yang perlu dilakukan oleh pemimpin pendidikan dalam melakukan pengarahan, yaitu; prinsip mengarah pada tujuan, prinsip keharmonisan dengan tujuan dan prinsip kesatuan komando.¹¹

4. *Controlling* (Pengawasan)

Adapun tahapan yang terakhir adalah *controlling* (pengawasan) atau bisa disebut juga sebagai proses pengendalian. Dalam kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui dan memberikan penilaian terhadap hasil atau proses yang sejauh ini sudah dijalankan apakah sudah sesuai dengan garis yang sudah ditentukan dalam proses perencanaan atau justru sebaliknya. Jika dari hasil kegiatan ini ternyata terbukti bahwa perencanaan yang sudah dibuat tidak tercapai secara efektif dan efisien, maka harus mencari langkah-langkah alternatif sekaligus dengan tindak lanjut yang lebih konkrit.

Menurut Manulang agar pengawasan berjalan dengan efektif, maka harus dilakukan dengan tiga tahap yaitu tahap penetapan alat ukur, tahap mengadakan penilaian, dan tahap mengadakan tindakan perbaikan.¹² Pada tahap yang pertama bertujuan untuk memberikan standart atau alat ukur dari pencapaian organisasi. Sedangkan tahap kedua adalah membandingkan suatu yang sudah dikerjakan dengan standar yang telah ditentukan pada tahap pertama. Kemudian, jika ternyata dari perbandingan tersebut tidak sama dengan standar, maka harus dilakukan perbaikan yang merupakan langkah terakhir.

Agar kegiatan pengawasan dapat berjalan dengan baik, kemindiknas mengemukakan beberapa poin penting mengenai pelaksanaan dari kegiatan pengawasan yaitu:¹³

- a. Pengawasan bersifat membimbing dan membantu mengatasi kesulitan dan bukan mencari kesalahan.
- b. Bantuan dan bimbingan diberikan secara tidak langsung. Artinya diupayakan agar yang bersangkutan merasa mampu mengatasi sendiri masalahnya.

¹¹ Ibid. Hlm.41

¹² Baharuddin dan Moh.Makin, *Manajemen Pendidikan Islam.....* ,hlm 112

¹³ Ibid. Hlm. 113

- c. Saran seharusnya segera diberikan dengan tujuan agar yang bersangkutan segera memahami.
- d. Pengawasan dilakukan secara periodik, artinya tidak menunggu sampai terjadi hambatan.
- e. Pengawasan dilaksanakan dalam suasana kemitraan.

Konsep Dasar Kepemimpinan Pendidikan *Islam*

Sebagai suatu wadah yang memiliki orientasi dan tujuan bersama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sudah barang tentu pendidikan harus memiliki seorang pemimpin untuk dijadikan sebagai power sekaligus panutan bagi masyarakat organisasi dalam menjalankan tugasnya. sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa Kehidupan dalam sebuah organisasi pendidikan khususnya sangat ditentukan oleh adanya dan peran dari seorang pemimpin.

Untuk itu dapat dikatakan bahwa sukses tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang hendak dicapai sangat bergantung kepada bagaimana kemampuan pimpinannya untuk menumbuhkan iklim kerja sama agar dengan mudah dapat menggerakkan sumber-sumber tersebut, sehingga dapat mendayagunakannya dan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Istilah kepemimpinan dalam pendidikan *Islam*, menurut Nawawi diartikan sebagai proses menggerakkan, mempengaruhi, memberikan motivasi dan mengarahkan orang-orang di dalam organisasi atau lembaga pendidikan tertentu untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Selanjutnya ia juga menegaskan bahwa untuk mewujudkan tugas tersebut setiap pemimpin pendidikan harus mampu bekerja sama dengan orang-orang yang dipimpinnya untuk memberikan motivasi agar melakukan pekerjaan secara ikhlas. Dengan demikian pemimpin pendidikan harus memiliki perasaan “*membership*”.¹⁴

Seiring dengan tugas utamanya mengarahkan, menggerakkan, membimbing dan menginspirasi orang yang dipimpinnya, maka seorang pemimpin diharuskan memiliki persyaratan kualitatif sebagai berikut:¹⁵

1. Memiliki kemampuan *technical skill*, yakni kemampuan melaksanakan hal-hal yang bersifat teknis, seperti menggunakan

¹⁴ Ibid. Hlm. 33

¹⁵Abuddin Nata, *Manajemen Pendidikan*, (Jakarta: Perdana Media Group, 2010), hlm. 367-368.

peralatan teknologi komputer, teknologi komunikasi dan interaksi, media dan peralatan teknologi lainnya, serta mampu melaksanakan hal-hal lain yang bersifat teknis, seperti mengatur tata ruang kerja, *standart operating procedure* (SOP), dan lain sebagainya.

2. *Leadership skill*, yakni kemampuan memengaruhi, mengarahkan, membimbing dan menggerakkan sumber tenaga kerja, agar mau bekerja sesuai prosedur yang ditetapkan.
3. *Emotional skill*, yakni kemampuan mengelola dan mengendalikan emosinya agar menjadi sesuatu yang positif, dengan cara merasakan apa yang dirasakan orang lain, sehingga timbul rasa cinta, peduli, simpati, dan empati, dan kasih sayang yang selanjutnya akan mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu pekerjaan dengan penuh semangat.
4. *Communicatoin skill*, yakni kemampuan membangun hubungan dan kerja sama dengan orang lain, atas dasar saling membantu, tolong menolong, toleransi dan saling menghargai melalui komunikasi yang ini, maka akan terjadi persamaan pandangan dalam melihat sesuatu, dan karenanya tidak akan terjadi salah persepsi yang menyebabkan terjadinya kesalahan tindakan dan perbuatan. Melalui komunikasi yang baik, maka akan terjadi sinkronisasi dan kordinasi yang baik, sehingga akan mampu menghindari hal-hal yang bersifat *overlapping*, salah urus dan sebagainya.
5. *Moral skill*, yakni kemampuan untuk memberikan bobot dan makna dari sesuatu yakni kemampuan mengarahkan sesuatu yang dilakukan atas dasar kejujuran, keadilan, kebersamaan, demokrasi, dan keinginan mewujudkan kesejahteraan bersama diantara sesama anggota karyawan, sehingga dapat dirasakan sebagai sesuatu yang membahagiakan.
6. *Spiritual skill*, yakni kemampuan untuk memberikan makna ilahiyah dan transendental atas sesuatu pekerjaan yang dilakukan, sehingga pekerjaan tersebut akan terhindar dari tujuan-tujuan yang bertentangan dengan ajaran Agama. Kemampuan tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk mengarahkan dan menetapkan tugas dan pekerjaan sebagai amanah yang harus di pertanggung jawabkan di hadapan Allah, dan menganggapnya sebagai bentuk pengabdian dan ibadah yang semata-mata dilakukan ikhlas karena Allah SWT.

Pada hakikatnya, pembahasan kepemimpinan dalam pendidikan konteks kajian ini secara khusus merujuk kepada kepala sekolah selaku pemimpin dalam ruang lingkup sekolah. Sehingga diharapkan ia mampu menjalankan fungsinya sebagai seorang pemimpin. Menurut Hendiyati Soetopo (1998) fungsi kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan ialah menciptakan situasi belajar mengajar sehingga semua guru dapat mengajar dan murid bisa belajar dengan baik.¹⁶

Dalam kebijakan pendidikan nasional, seorang kepala sekolah harus mempunyai beberapa kompetensi yang dijadikan sebagai kekuatan dalam menjalankan tugasnya. Sederhananya, kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh seseorang dalam menjalankan tugas profesionalnya. Oleh sebab itu, adapun kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang kepala sekolah adalah kompetensi kepribadian, kompetensi manajerial, kompetensi sosial, kompetensi supervisi, dan kompetensi kewirausahaan.¹⁷

Kepala sekolah sebagai pemimpin dalam lembaga pendidikan yang bersifat formal dan terencana mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sangat strategis dalam mengelola seluruh sumber daya pendidikan guna untuk mencapai tujuan pendidikan. Oleh sebab itu, demi sebuah keberhasilan seorang kepala sekolah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Lipham, Rankin, Hoeh Jr mengungkapkan ada beberapa hal yang perlu dipahami diantaranya adalah:¹⁸

- a. Kepala sekolah harus menyadari bahwa kualitas kepemimpinannya merupakan hal penting dalam kesuksesan sekolah
- b. Kepala sekolah harus bisa merubah gaya kepemimpinan mereka sebagaimana yang telah diperingatkan oleh situasi organisasi
- c. Kepala sekolah harus membuat pandangan kepemimpinan jangka panjang
- d. Kepala sekolah harus memahami bahwa situasi sekolah itu kompleks, dinamis dan interaktif.

¹⁶ Sobry Sutikno *Manajemen Pendidikan Langkah Praktis Dalam Mewujudkan Lembaga Pendidikan Yang Unggul*. (Lombok: Holistica, 2012), hlm. 124

¹⁷ Uhaar Suharsaputra, *Kepemimpinan Inovasi Pendidikan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2016). hlm.114

¹⁸ Cepi Triatna, *Perilaku Organisasi Dalam Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2015), hlm. 171

- e. Kepala sekolah harus membuat pandangan yang luas bahkan terbatas tentang hubungan keorganisasian.
- f. Kepala sekolah harus menyadari tidak hanya penggunaan satu kriteria dalam evaluasi kualitas kepemimpinannya, tetapi kriteria yang banyak.

Hakikat *Entrepreneurship*

Entrepreneurship dan *entrepreneur* merupakan dua konsep yang saling berkaitan antar keduanya. *Entrepreneur* menyebabkan *Entrepreneurship* begitupula *Entrepreneurship* yang dikerjakan oleh *Entrepreneur*. Dalam konteks akademik, *Entrepreneurship* merupakan kajian tentang proses perubahan dalam menyikapi situasi yang terus berubah¹⁹, dan *Entrepreneur* merupakan salah satu kajian penting di dalamnya, karena *Entrepreneur* merupakan pelaksana atau perwujudan dari pemikiran, sikap dan perilaku yang mencerminkan *Entrepreneurship*.²⁰

Entrepreneurship berkaitan dengan melakukan sesuatu yang umumnya tidak dilakukan dalam kondisi biasa, oleh sebab itu *Entrepreneurship* sering dipandang sebagai proses inovasi dan kreatifitas serta kemampuan dalam mengenali peluang yang bagi banyak orang dianggap membingungkan sehingga tidak atau sulit dipecahkan.

Menurut Heru kristanto, mengartikan *Entrepreneurship* (kewirausahaan) sebagai ilmu, seni maupun perilaku, sifat, ciri dan watak seseorang yang memiliki kemampuan dalam mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia nyata secara kreatif (*creat new and different think*) agar mampu bersaing dengan tujuan menciptakan kemakmuran individu dan masyarakat.²¹

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa *Entrepreneurship* merupakan suatu ilmu, seni ataupun perilaku yang melekat pada diri seseorang yang menjadikan ia mampu melahirkan ide-ide baru sekaligus ditunjukkan dengan proses kreatifitas agar memiliki nilai tambah dan nilai guna kepada orang lain.

¹⁹ Saeful Anam, "Pesantren Entrepreneur Dan Analisis Kurikulum Pesantren Mukmin Mandiri Waru Sidoarjo Dalam Pengembangan Dunia Usaha," *Maraji* 1, no. 1 (2016): 304–29.

²⁰ Uhaar Suharsaputra, *Kepemimpinan Inovasi Pendidikan*, hlm. 78

²¹ R. Heru kristanto HC, *Kewirausahaan Entrepreneurship Pendekatan Manajemen Dan Praktik*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2009) hlm. 3

Coulter menyebutkan dalam bukunya Wiedi Murtini bahwa dalam *Entrepreneurship* menekankan pada delapan unsur pokok yaitu sebagai berikut:²²

1. *The Entrepreneur* (wirausaha), merupakan unsur pertama yang terpenting dalam *Entrepreneurship*. Yakni seseorang yang menjalankan kegiatan usaha untuk mencapai tujuan yang diharapkan
2. *Inovation* (inovasi), di dalamnya termasuk aktivitas merubah, mengganti, merevolusi dan memperkenalkan pendekatan baru
3. *Organization creation* (membentuk organisasi), artinya untuk menghasilkan nilai tambah terhadap suatu produk atau jasa menjadi sesuatu yang baru maka harus ada wadah/organisasi sebagai penggerak untuk merealisasi tujuan tersebut.
4. *Creating value* (menghasilkan nilai), melalui kegiatan *Entrepreneurship* seseorang akan menghasilkan produk baru, pelayanan baru, transaksi baru, sumber daya dan pemasaran yang diciptakannya sehingga memberikan kontribusi nilai lebih terhadap komunitas dan pasar.
5. *Profit dan non profit* (laba dan nirlaba), tujuan *Entrepreneurship* adalah untuk laba akan tetapi juga untuk agency pelayanan sosial.
6. *Growth* (pertumbuhan), mengejar tumbuhnya *Entrepreneurship* dengan selalu mengejar dan meraih peluang yang ada untuk diraihinya sehingga melahirkan bisnis baru
7. *Uniqueness* (keunikan), termasuk di dalamnya membuat kombinasi baru, pendekatan-pendekatan baru yang dilakukan dengan uji coba sehingga mempunyai sebuah keunikan yang tidak dimiliki oleh orang lain
8. *Procces* (proses), yakni serangkaian tindakan dan pengambilan keputusan yang dilakukan secara kontinuitas.

Dengan demikian, melalui *Entrepreneurship* produk unik akan selalu dimunculkan dengan menggunakan cara atau pendekatan baru. Aktivitas dari *Entrepreneur* tidak hanya proses menduplikasi saja akan

²² Wiedi Murtini, *Kewirausahaan Pendekatan Succes Story*, (Surakarta:LPP UNS Press,2009),hlm. 37

tetapi harus berakhir pada sebuah penciptaan atau karya yang baru sekaligus dengan cara yang baru pula sehingga mendatangkan keuntungan laba ataupun nirlaba.

Manajemen Pendidikan *Islam* Berbasis *Entrepreneurship*

Secara makna leksikalnya, manajemen pendidikan *Islam* berbasis *entrepreneurship* merupakan sebagai pengelolaan lembaga pendidikan *Islam* dengan menggunakan prinsip-prinsip *Entrepreneurship* ataupun menciptakan kewirausahaan, yakni mendayagunakan segala sumber daya yang ada agar tujuan pendidikan tercapai secara efektif dan efisien²³.

Pada dasarnya, MPBE ini merupakan dampak dari kebijakan pemerintah yang berupa desentralistik dalam pendidikan sebagaimana yang telah dibahas pada point pendahuluan. Pihak sekolah diberikan keleluasaan untuk mengatur dan mengelolah lembaganya masing-masing sesuai dengan kemampuan, kekuatan dari segala aspek sumber daya yang dimilikinya. Implementasi MPBE diarahkan terhadap proses peningkatan mutu sekolah dengan menjadikan peningkatan finansial sekolah sebagai tujuan utamanya. Artinya, dengan adanya MPBE lembaga sekolah diharapkan mampu menciptakan kreatifitas dengan mendayagunakan sumber daya yang ada melalui proses inovasi dan kreatifitas sehingga menghasilkan nilai finansial yang lebih untuk kepentingan pendidikan tanpa harus menggantungkan diri sepenuhnya terhadap anggaran pendidikan dari pemerintah.

Dengan kemandirian sekolah yang ditopang dengan kekuatan finansial yang bersumber dari pendayagunaan sumber daya yang ada akan menjadikan pendidikan tersebut mampu meningkatkan mutu dengan baik karena lembaga pendidikan sudah lebih lincah dalam mengelolah pendidikan yang sesuai kebutuhan dan potensinya.

Terlepas dari idealisasi tujuan MPBE, tentunya banyak orang tidak setuju untuk menerapkan konsep tersebut dalam dunia pendidikan. Mereka beranggapan bahwa sekolah dengan sendirinya akan terjebak pada tindakan yang tidak baik yaitu menjadaiakan pendidikan sebagai ladang bisnis atau dengan bahasa populernya yang kita kenal dengan sebutan komersialisasi pendidikan. Pemahaman

²³ Kiki Saputra, *Pendidikan Berbasis Entrepreneurship*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2015), hlm. 20

yang seperti ini harus diluruskan dengan memberikan sebuah pengetahuan bahwa konsep *entrepreneurship* diterapkan dalam dunia pendidikan merupakan salah satu upaya untuk memberikan kepuasan terhadap peserta didik atau masyarakat secara umum terhadap pelayanan yang akan diberikan oleh pengelola sekolah.

Setelah lembaga sekolah menggunakan prinsip-prinsip dari *entrepreneurship*, pengelola dapat mendirikan kegiatan wirausaha dalam pendidikan. Dengan tujuan agar lembaga pendidikan leluasa meningkatkan kualitas pendidikan. Selain itu, peserta didik juga bisa berkontribusi untuk menerapkan ilmunya dalam dunia nyata.

Meningkatkan kualitas pendidikan agar mampu mencetak peserta didik berkarakter serta berkompeten merupakan tujuan umum dari MPBE. Meningkatkan mutu pendidikan berdasarkan MPBE melalui pengelolaan lembaga pendidikan secara mandiri, sehingga dalam pengelolaan tersebut, pihak sekolah dan masyarakat tidak perlu menunggu kebijakan dari pemerintah pusat untuk mengambil sebuah keputusan untuk memajukan serta mengelolah lembaganya. Dengan dikelolah sendiri visi dan misi sekolah dapat dikembangkan sesuai dengan tujuan institusional dengan mempertimbangkan keadaan lembaga sekolahnya. Secara terperinci MPBE memiliki lima tujuan dasar antara lain sebagai berikut:²⁴

1. Lembaga pendidikan tidak selalu menggantungkan anggaran pendidikan kepada pemerintah pusat
2. Mengembangkan berbagai potensi dan mengelolah lembaga pendidikan secara mandiri
3. Warga sekolah merasa puas dengan fasilitas yang ada, baik masalah akademik ataupun fasilitas yang lain
4. Mengembangkan kemampuan pengelola pendidikan dalam peningkatan mutu pendidikan serta,
5. Memanfaatkan sumber daya untuk wirausaha.

Setiap manajemen yang diterapkan dalam dunia pendidikan memiliki karakteristik tersendiri untuk memberikan perbedaan yang sangat signifikan. Begitu pula pada Manajemen pendidikan berbasis *entrepreneurship*. MPBE ini memiliki empat karakteristik yaitu sebagai berikut:²⁵

²⁴ Ibid, hlm. 22

²⁵ Ibid, hlm. 23

1. Pengelola lembaga pendidikan diberi keleluasaan untuk mengambil kebijakan yang berhubungan dengan manajemen pendidikan
2. Lembaga pendidikan dapat meningkatkan mutu pendidikan dengan mengelolah pendidikan secara mandiri
3. Lembaga pendidikan dapat menciptakan wirausaha dalam sekolah yang bertujuan untuk memuaskan semua warga sekolah, dan
4. Lembaga pendidikan mengembangkan mutu pendidikan mengacu pada kebijakan pemerintah pusat

Sedangkan prinsip dari MPBE antara lain sebagai berikut:²⁶

1. Prinsip *ekuifinalitas*. dalam prinsip ini, manajemen pendidikan menekankan fleksibilitas, artinya lembaga pendidikan dikelola sesuai dengan kondisinya masing-masing).
2. Prinsip *desentralisasi*. (lembaga pendidikan diberi keleluasaan untuk mengelolah pendidikan di tingkat sekolah)
3. Prinsip sistem pengelolaan mandiri (dalam mengelola pendidikan, MPBE tidak perlu menunggu kebijakan dari pemerintah pusat)
4. Prinsip inisiatif manusia. (MPBE membangun lingkungan yang sesuai dengan potensi peserta didik

Kepemimpinan Pendidikan *Islam* Berbasis *Entrepreneurship*

Mengelolah lembaga atau organisasi pendidikan tidaklah mudah, di mana banyak beban dan tanggung jawab yang harus dijalankan khususnya bagi seorang kepala sekolah selaku pemimpin sekaligus manajer di lembaga pendidikan. Kebijakan pemerintah yang berupa desentralisasi pendidikan memberikan konsekwensi tersendiri kepada setiap kepala sekolah untuk merubah paradigma atau cara pandang dalam memimpin lembaga sekolahnya.

Dalam hal tersebut menurut Clarke dan New Man terdapat tiga unsur penting yakni pertama, pergeseran perspektifdari etos pelayanan publik menjadi etos yang lebih fokus bisnis kedua, penekanan yang makin meningkat dalam merespon lingkungan eksternal dan yang ketiga tumbuhnya penekanan pada keterampilan *entrepreneurship*²⁷.

²⁶ Ibid, hlm 44-46

²⁷ Uhaar Suharsaputra, *Kepemimpinan Inovasi Pendidikan*,...,hlm. 191

Pernyataan tersebut memberikan penekanan bahwa kepemimpinan yang dapat menghadapi berbagai tantangan perubahan dan sensitif pada peluang, menjadi kebutuhan pokok bagi setiap organisasi sekolah. Tentunya, dalam hal ini kepemimpinan *entrepreneur* kepala sekolah akan mampu menjawab serta bisa memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap lembaga pendidikan dalam menyikapi persoalan tersebut bahkan dalam penerapan MPBE pun juga membutuhkan kepala sekolah yang berbasis *entrepreneurship*.

Kepala sekolah yang menekankan pada kreatifitas dan kepercayaan serta kontribusi bagi masyarakat sebagai ciri dari kepemimpinan *entrepreneur* yang amat dibutuhkan oleh setiap lembaga pendidikan. Dengan kepemimpinan yang berbasis *entrepreneurship* ini akan mampu mengembangkan lembaga pendidikan kearah yang lebih inovatif melalui peningkatan kreatifitas, kepercayaan serta memanfaatkan peluang untuk kemajuan dan peningkatan mutu sekolah.

Kepemimpinan kepala sekolah yang berbasis *entrepreneurship* bisa diartikan sebagai kemampuan kepala sekolah dalam mempengaruhi anggota organisasi sekolah untuk bekerja mencapai tujuan dengan menerapkan spirit *entrepreneurship*/kewirausahaan dalam prosesnya yang meliputi perubahan, transformasi, inovasi, perbaikan berkelanjutan serta sensitif terhadap peluang yang ada baik internal ataupun eksternal organisasi sekolah²⁸.

Dari pengertian tersebut, sederhananya kepala sekolah yang menjalankan tugasnya dengan basis *entrepreneurship* adalah mereka yang mampu memadukan perannya sebagai seorang pemimpin, manajer dan sebagai *entrepreneur*. Sehingga eksistensi organisasi sekolah berani melakukan perubahan dan inovasi serta cermat dalam melihat dan memanfaatkan peluang bagi kemajuan dan peningkatan mutu sekolah. Sebagaimana yang telah dibahas pada point sebelum-nya, karakteristik utama yang ditunjukkan oleh pemimpin *entrepreneur* adalah kreativitas, inovasi dan pengambilan resiko dalam setiap aktivitas dalam organisasi sekolah. Akan tetapi jika lebih dispesifikan kembali dengan memperhatikan makna *entrepreneur*, kepemimpinan dalam konteks pendidikan maka dapat dikatakan bahwa karaktersitik kepala sekolah yang berbasis *entrepreneurship* adalah sebagai berikut:²⁹

²⁸ Ibid, hlm.193

²⁹ Ibid, hlm.195-156

1. Mengutamakan pengembangan SDM melalui pengembangan profesional berkelanjutan dan membangun atau mengembangkan budaya organisasi yang inovatif
2. Inisiator untuk melakukan sesuatu bagi kepentingan organisasi sekolah, kreatif dan inovatif dalam menjalankan tugas
3. Menguatkan nilai dan mendiskusikan visi, misi dan tujuan dengan seluruh *stakeholder* sekolah
4. Menjadikan tantangan sebagai peluang untuk dikembangkan menjadi program kegiatan yang memberi nilai tambah bagi organisasi
5. Visioner dengan orientasi yang kuat terhadap masa depan serta melakukan komunikasi dan menginternalisasikannya
6. Berfikir strategis, mempunyai motivasi berprestasi yang kuat, mandiri dan optimis sehingga berani menanggung resiko
7. Menjadikan masa depan sebagai bagian kinerja saat ini dengan fleksibilitas yang memadai
8. Bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya.
9. Menginspirasi dengan sikap dan tindakan
10. Mampu berubah dan mengelolah perubahan.
11. Mendorong kreativitas pegawai/bawahan (staf atau guru)

Dengan mencermati karakteristik tersebut terdapat disparitas yang sangat mendasar dengan kepemimpinan sekolah yang lainnya diantaranya yang paling dirasakan adalah pertama dari sikap kreativitas dan inovasinya serta mampu mendorong orang lain untuk melakukan yang sedemikian kedua dari sikap keterbukaan dan keberanian dalam pengambilan keputusan serta bertanggung jawab dari setiap kemungkinan yang akan diakibatkan oleh keputusan tersebut ketiga dari sikap dalam kecermatan dalam memanfaatkan peluang dan lain sebagainya.

Catatan Akhir

Dalam usaha peningkatan mutu pendidikan, manajemen pendidikan *Islam* dan kepemimpinan pendidikan *Islam* membutuhkan formulasi dan paradigma baru sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dalam hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pembahasan di atas bahwa manajemen dan pendidikan *Islam* yang berbasis *entrepreneurship* merupakan cara pandang baru untuk meningkatkan mutu pendidikan *Islam* dengan memperkuat keuangan lembaga pendidikan *Islam* agar menjadi pendidikan yang

mandiri dengan memaksimalkan pendayagunaan sumber daya yang dimiliki lembaga yang dipimpin langsung oleh kepala sekolah yang juga berbasis *entrepreneurship*.

Manajemen pendidikan *Islam* yang berbasis *entrepreneurship* merupakan serangkaian aktivitas manajemen dalam mengelola lembaga pendidikan *Islam* dengan basis *entrepreneurship*. Konsep *entrepreneurship* ini tidak selamanya menyangkut kegiatan yang bersifat komersial saja melainkan juga memberikan pelayanan lebih baik kepada semua pihak yang berkepentingan dalam ruang lingkup pendidikan. Sedangkan kepemimpinan pendidikan (kepala sekolah) *entrepreneur* adalah kepala sekolah yang menerapkan jiwa, sikap dan perilaku *entrepreneur* dalam melaksanakan fungsi, tugas dan perannya sebagai pemimpin dalam menggerakkan seluruh anggota organisasi sekolah untuk mencapai tujuan sekolah.

Daftar Pustaka

- Anam, Saeful. "Pesantren Entrepreneur Dan Analisis Kurikulum Pesantren Mukmin Mandiri Waru Sidoarjo Dalam Pengembangan Dunia Usaha." *Maraji* 1, no. 1 (2016): 304–29.
- Atiqullah, Nailah Aka Kusuma, "Manajemen Dan Kepemimpinan Pendidikan *Islam*", (Surabaya: Pena Salsabila, 2014).
- Baharuddin, Moh. Makin, "Manajemen Pendidikan *Islam*", (Malang: UIN Maliki Press, 2010).
- Handoko, Hani, "Manajemen Edisi 2", (Yogyakarta: BPFE, 2000).
- Kristanto, R. Heru, "Kewirausahaan *Entrepreneurship* Pendekatan Manajemen dan Praktik", (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009).
- Marno, Triyo Supriyanto, "Manajemen Dan Kepemimpinan Pendidikan *Islam*", (Bandung: Refika Aditama, 2013).
- Murtini, Wiedi, "Kewirausahaan Pendekatan Succes Story", (Surakarta: LPP UNS Press, 2009).
- Nata, Abuddin, "Manajemen Pendidikan", (Jakarta: Media Group, 2010).
- Qomar, Mujamil, "Manajemen Pendidikan *Islam*", (Jakarta: PT.Gelora Aksara Pratama, 2007).

- Saebani, Beni Ahmad, "Filsafat Manajemen", (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012).
- Saputra, Kiki, "Pendidikan Berbasis *Entrepreneurship*", (Yogyakarta: DIVA Press, 2015).
- Suharsaputra, Uhaar, "Kepemimpinan Inovasi Pendidikan", (Bandung: PT. Refika Aditama, 2016).
- Sukaji, Umiarso, "Manajemen dalam Pendidikan *Islam*", (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014).
- Sutikno, Sobry, "Manajemen Pendidikan Langkah Praktis Dalam Mewujudkan Lembaga Pendidikan Yang Unggul", (Lombok: Holistica, 2012).